BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (Rp. Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2001	8.275,15	8,83
2002	8.933,52	7,96
2003	9.145,85	2,38
2004	9.437,35	3,19
2005	9.783,26	3,67
2006	10.358,88	5,88
2007	10.846,72	4,71
2008	11.466,58	5,71
2009	12.039,95	5,00
2010	12.736,39	5,78
2011	13.673,46	7,36
2012	14.053,62	2,78
2013	14.695,73	4,57
2014	15.549,50	5,81
2015	15.830,52	1,81
2016	16.249,80	2,65
2017	16.748,26	3,07
2018	17.241,20	2,94
2019	17.967,59	4,21
2020	17.262,51	-3,92
2021	17.284,93	0,13
	Rata-rata	4,02

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 mengalami naik dan turun setiap Tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 21 Tahun terakhir adalah 4,02 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat pada Tahun 2001 yaitu sebesar 8,83 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2001 terjadi karena meningkatnya sektor unggulan PDRB yaitu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah tercatat pada Tahun 2020 yaitu -3,92 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 dikarenakan akibat terpuruknya perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipicu oleh adanya kontraksi di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,47% menjadi Rp 9,59 triliun pada 2020 dari Tahun sebelumnya. Pada 2019, sektor tersebut berkontribusi sebesar 50% terhadap perekonomian kabupaten tersebut, tetapi pada 2020 menyusut menjadi hanya 35,5% dari PDRB.

Kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 beberapa kali mengalami penurunan. Selain tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2003 yang mana pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami perlambatan pertumbuhan yang terjadi akibat melambatnya peningkatan produksi di sektor pertambangan dan penggalian. Begitu juga pada tahun 2007, 2009, 2012, 2015 dan tahun 2018 yang mengalami penurunan akibat melambatnya peningkatan produksi di sektor pertambangan dan penggalian. Produksi yang dimaksud adalah produksi

pertambangan dan penggalian antara lain minyak gas dan bumi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Memiliki potensi sumberdaya alam minyak gas dan bumi yang besar.

5.1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mengetahui perkembangan IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.2 Perkembangan IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021

Tahun	Komponen IPM				IPM
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata – rata lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	
2001	61,18	-	4,17	6.398,28	50,90
2002	61,23	-	4,57	6.524,28	51,94
2003	61,55	-	4,60	6.728,65	52,66
2004	61,81	-	4,63	6.938,55	54,65
2005	63,11	-	4,67	7.003,12	55,24
2006	63,48	-	4,70	7.014,25	55,32
2007	63,55	-	4,73	7.095,65	55,88
2008	63,89	-	4,76	7.122,82	56,21
2009	64,30	-	4,82	7.168,83	56,65
2010	64,76	10,42	4,87	7.219,62	57,21
2011	64,93	10,50	5,11	7.266,97	57,77
2012	65,10	10,57	5,57	7.316,00	58,63
2013	65.25	10,65	5,90	7.455,00	59,41
2014	65,33	10,73	5,93	7.699,25	59,88
2015	65,43	11,28	6.26	7.810,00	61,12
2016	65,56	11,48	6,32	8.136,00	61,88
2017	65,69	11,80	6,33	8.403,00	62,61
2018	65,86	11,85	6,34	8.904,00	63,32
2019	66,08	12,01	6,35	9.192,00	63,92
2020	66,23	12,16	6,70	9.026,00	64,43
2021	66,34	12,17	6,92	9.163,00	64,91
Rata – Rata	61,34	11,30	5,16	7.599,30	58,31

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 mengalami naik dan turun setiap Tahunnya. Rata-rata IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 21 Tahun terakhir adalah 58,31. IPM tertinggi tercatat pada Tahun 2021 yaitu sebesar 64,91 dikarenakan komponen IPM juga terus mengalami peningkatan. Sedangkan IPM terendah tercatat pada Tahun 2001 yaitu 50,90. Rendahnya IPM pada Tahun 2001 dikarenakan pada tahun 2001 fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan angka harapan hidup pada tahun 2001 sebesar 61,18 tahun, rata-rata lama sekolah hanya 4,17 tahun atau setara dengan pendidikan kelas 4 Sekolah Dasar dan pengeluaran perkapita hanya Rp. 6.398,28 ribu pertahunnya.

Rendahnya IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 disebabkan rata-rata angka harapan hidup hanya 61,34 tahun, rata-rata harapan lama sekolah hanya 11,30 tahun, rata-rata lama sekolah hanya 5,16 tahun atau setara kelas 5 Sekolah Dasar dan rata-rata pengeluaran perkapita hanya Rp. 7.599,30 ribu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang dimiliki penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah, serta tingkat kesejahteraannya masih rendah.

5.1.3 Perkembangan Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok. Berikut ini Tabel perkembangan upah minimum Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

Tabel 5.3 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2001-2021

Tahun	Upah Minimum (Rp.)	Perkembangan (%)
2001	245.000	22,50
2002	304.000	24,08
2003	390.000	28,29
2004	425.000	8,97
2005	485.000	14,12
2006	563.000	16,08
2007	658.000	16,87
2008	724.000	10,03
2009	800.000	10,5
2010	900.000	12,5
2011	1.028.000	14,22
2012	1.142.000	11,14
2013	1.300.000	13,79
2014	1.502.000	15,56
2015	1.710.000	13,83
2016	1.906.000	11,5
2017	2.063.000	8,2
2018	2.243.718	8,76
2019	2.400.000	6,97
2020	2.630.162	9,59
2021	2.649.034	0,72
Rata-Rata		**13,25**

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 upah minimum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan setiap Tahunnya, namun perkembangannya masih bernaik dan turun. Rata-rata perkembangan upah minimum Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 yaitu sebesar 13,25 persen. Artinya upah minimum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sebesar 14,10 persen setiap Tahunnya. Upah minimum yang digunakan untuk standar upah di Tanjung Jabung Timur masih menggunakan upah minimum provinsi (UMP) Provinsi Jambi. UMP Provinsi Jambi berada pada peringkat ke-15 dari 34 Provinsi

di Indonesia, namun UMP Provinsi Jambi secara rata-rata lebih besar dari rata-rata upah minimum Indonesia.

Perkembangan upah minimum tertinggi tercatat pada Tahun 2003 dengan perkembangan upah minimum sebesar 28,29 persen. Pada Tahun 2003 upah minimum yang ditetapkan sebesar Rp.304.000, nilai upah minimum ini naik dari Tahun sebelumnya sebesar Rp. 86.000. Tujuan dinaikknanya upah minimum agar daya beli masyarakat meningkat. Pada Tahun 2021 upah minimum yang ditetapkan sebesar Rp2.649.034 hanya naik dari Tahun sebelumnya sebesar 0,72 persen. Rendahnya perkembangan tersebut disebabkan oleh dampak pandemic covid-19, sehingga pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum dengan kenaikan yang tidak signifikan.

5.1.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan seseorang yang tidak melakukan kegiaran atau tidak melakukan pekerjaan apa pun, sedang mencari kerja, selama seminggu hanya bekeria kurang dari dua hari, acau yang dalam tahap berusaha memperoleh pekerjaan yang pantas. Untuk mengetahui perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2001-2021

Tahun	Bekerja (Orang)	Pengangguran (Orang)	Angkatan Kerja (Orang)	Tingkat Pengangguran (%)
2001	76.147	6.838	82.985	8,24
2002	78.418	6.921	85.339	8,11
2003	88.569	7.754	96.323	8,05
2004	88.030	7.582	95.612	7,93
2005	86.050	7.118	93.168	7,64
2006	97.569	7.763	105.332	7,37
2007	91.985	6.913	98.898	6,99
2008	96.470	4.896	101.366	4,83
2009	102.130	2.415	104.545	2,31
2010	101.090	3.105	104.195	2,98
2011	98.172	2.270	100.442	2,26
2012	105.498	2.285	107.783	2,12
2013	94.420	3.455	97.875	3,53
2014	106.734	1.879	108.613	1,73
2015	105.131	1.536	106.667	1,44
2016	135.135	2.365	137.500	1,72
2017	119.030	2.877	121.907	2,36
2018	113.866	2.078	115.944	1,80
2019	111.828	1.853	113.681	1,63
2020	119.567	1.710	121.277	1,41
2021	115.604	1.832	117.436	1,56
Rata-Rata	101.497	4.069	105.566	4,10

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 yaitu sebesar 4,10 persen. Tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada tahun 2001 yaitu sebesar 8,24 persen. Tingginya tingkat pengangguran pada Tahun tersebut disebabkan sempitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akibat dari rendahnya minat investor untuk mendirikan perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan tingkat pengangguran terendah tercatat pada Tahun 2020 yaitu 1,41 persen. Hal ini dikarenakan saat ini penduduk di Kabuapten Tanjung Jabung Timur banyak bekerja di sektor pertanian.

Tingkat pengangguran mengalami peningkatan pada periode Tahun 2001-2021 yaitu pada tahun 2011, 2014 dan 2017. Meningkatnya tingkat pengangguran terjadi karena tinginya peningkatan angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan pengangguran-pengangguran baru yang dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.1.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2001-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2001	22.058	191.844	12,21
2002	22.231	188.006	11,86
2003	22.805	200.055	11,41
2004	23.511	203.402	11,61
2005	27.826	204.391	13,44
2006	28.893	207.340	13,97
2007	28.376	209.477	13,44
2008	28.993	211.789	13,49
2009	26.418	213.781	12,21
2010	25.439	205.885	12,40
2011	26.428	207.496	11,60
2012	26.276	207.496	12,50
2013	28.314	210.599	13,42
2014	28.799	212.084	13,55
2015	30.181	213.670	14,17
2016	27.426	215.316	12,76
2017	27.228	216.777	12,58
2018	26.993	218.413	12,38
2019	25.356	218.985	11,54
2020	24.237	221.619	10,95
2021	24.423	223.486	11,39
Rata-Rata	25.594	209.615	**12,52**

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2001-2021 yaitu sebesar 12,52 persen. Tingkat penagangguran tertinggi tercatat pada Tahun 2015 yaitu sebesar 14,17 persen. Tingginya tingkat kemiskinan pada Tahun tersebut disebabkan oleh menurunnya harga jual buah sawit dan kelapa sehingga berdampak terhadap perekonomian penduduk. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat pada Tahun 2020 yaitu 10,95 persen. Hal ini dikarenakan rendahnya angka pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selama Tahun 2001-2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah 10 kali mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 dan tahun 2021. Selain tahun 2021, kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan karena tidak lepas karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi karena pengaruh pandemi covid-19.

5.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5.2.1 Uji Statistik Persamaan Struktural I

Berdasarkan olahan data regresi linier berganda untuk persamaan struktural I dengan menggunakan SPPS.25 maka hasil regresi linier berganda tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.6 Hasil Regresi Berganda Persamaan Struktural I

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	53,185	18,224		2,918	,010		
X1	-,006	,225	-,006	-,025	,981	,180	5,562
X2	-,782	,316	-1,230	-2,472	,024	,037	26,696
X3	1,131E-6	,000	,329	,776	,448	,052	19,368

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data diolah, 2023

Keterangan :

Y_1 = Tingkat Pengangguran
X_1 = Pertumbuhan Ekonomi
X_2 = Indeks Pembangunan Manusia
X_3 = Upah minimum

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,981. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih besar dari alpa (0,981 > 0,05), artinya Ho diterima dan Ha ditolak artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil ini tidak sependapat dengan Sukirno (2013) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berdampak pada menurunnya angka penganguran, salah satunya pengangguran terdidik karena semakin meningkatnya kesempatan kerja. Tidak berpengaruhnya Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran karena Pertumbuhan Ekonomi dalam periode 2001-2021 mengalami naik dan turun setiap Tahunnya, disaat Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan maka menurunnya permintaan tenaga kerja sehingga tidak berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,024. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha (0,024 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima artinya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil ini sependapat dengan Latifah (2017) yang mengatakan pengangguran juga diakibatkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dan tidak mampu kemudian tersisih pada kompetisi pasar yang modern saat ini. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas sumber daya manusia juga juga dapat menjadi fakor penyebab terjadinya pengangguran dan penduduk miskin. Berpengaruhnya Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran dikarenakan IPM setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga Angkatan kerja memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik sehingga pada akhirnya akan mengurangi pengangguran.

3. Upah Minimum

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Upah Minimum sebesar 0,448. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih besar dari alpha (0,448 > 0,05), artinya Ho diterima dan Ha ditolak artinya Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil ini tidak sependapat dengan Mankiw (2013) yang mengatakan upah yang

tinggi akan menyebabkan turunnya kesempatan kerja dan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Upah yang tinggi kemudian mengindikasikan biaya produksi yang tinggi pula. Dengan begitu, perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Tidak berpengaruhnya upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran karena upah minimum terus mengalami peningkatan sementara Tingkat Pengangguran juga mengalami naik dan turun, hal ini dikarenakan faktor Indeks Pembangunan Manusia atau faktor lainnya yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran, sehingga peningkatan upah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil regresi terdapat variabel bebas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran maka model persamaan struktural I perlu diperbaiki melalui model *Trimming.* Proposisi Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.

5.2.2 Uji Statistik Persamaan Struktural I Setelah Trimming

Berdasarkan olahan data regresi sederhana untuk persamaan struktural I setelah menggunakan model Trimming dengan menggunakan SPPS.25 maka hasil regresi linier sederhana tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.7 Hasil Regresi Sedehana Persamaan Struktural I Setelah Trimming

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	41,703	3,796		10,986	,000
	X2	-,581	,059	-,915	-9,865	,000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data diolah, 2023

Keterangan :

Y_1 = Tingkat Pengangguran

X_2 = Indeks Pembangunan Manusia

$$Y_1 = 41{,}703 - 0{,}581\ X_2$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar 41,703 hal ini berarti bahwa jika Indeks Pembangunan Manusia adalah konstan atau nol atau tidak berubah maka Tingkat Pengangguran meningkat menjadi sebesar 41,703 persen.
2. Koefesien Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0,581 hal ini berarti setiap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1 sementara variabel lain adalah konstan atau nol atau tidak berubah maka Tingkat Pengangguran menurun sebesar -0,581 persen.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,000. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha (0,000 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima artinya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.2.3 *Path Analysis* Persamaan Struktural I Setelah Trimming

Diagram jalur dapat digunakan untuk menghitung pengaruh secara langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen, pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam apa yang disebut koefisien jalur, dimana secara matematik analisis jalur ini mengikuti model struktural. Selanjutnya untuk mengetahui nilai koefisien jalur variabel bebas dapat dilihat pada Tabel 5.7 pada nilai coefficient beta. Nilai koefisien variabel nilai koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia yaitu -0,912, sementara nilai residu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.8 Nilai R^2

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915[a]	,837	,828	1,14745

a. Predictors: (Constant), X2
b. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5.8 dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah 0,837, nilai residu atau eror dapat dilihat sebagai berikut : 1- 0,837 = 0,163. Artinya nilai residu dalam penelitian ini yaitu 0,163, sehingga diperoleh diagram jalur yang dapat diGambarkan pada Gambar 5.1 berikut:

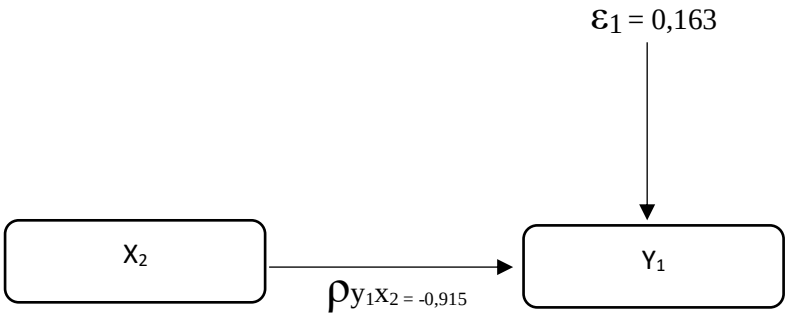

Gambar 5.1. Diagram Jalur Persamaan Struktural I Setelah Trimming

Dari Gambar 5.1 dapat dihitung pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen secara proporsional adalah sebagai berikut:

Pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia ke Tingkat Pengangguran $= (\rho y_1 x_2)^2 \times 100\%$
$= (-0{,}915)^2 \times 100\%$
$= 83{,}7\%$

Pengaruh langsung dari variabel eksogen yaitu Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran dapat terlihat pada Tabel 5.9 berikut :

Tabel 5.9. Pengaruh Langsung dan Pengaruh Total Persamaan Struktural I Variabel X_2 terhadap Y_1

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal			Pengaruh Total (%)
	Langsung (%)	Tidak Langsung		
		X_1 (%)	X_3(%)	
$X_2 \rightarrow Y_1$	83,7	-	-	83,7
Pengaruh Variabel X_2 terhadap $Y_1 = R^2$				**83,7**
Pengaruh Variabel Luar				**16,3**
Total				**100,0**

Sumber : Data Diolah, 2023

Atas dasar perhitungan di atas, dapat dikemukakan hal-hal yaitu kekuatan Indeks Pembangunan Manusia yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Tingkat Pengangguran sebesar 83,7 persen.

5.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5.3.1 Uji Statistik Persamaan Struktural II

Berdasarkan olahan data regresi linier berganda untuk persamaan struktural II dengan menggunakan SPPS.25 maka hasil regresi linier berganda tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.10 Hasil Regresi Berganda Persamaan Struktural II

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	21,214	3,174		6,683	,000		
X1	-,027	,032	-,082	-,858	,404	,180	5,562
X2	-,137	,052	-,637	-2,621	,019	,028	36,291
X3	-7,447E-8	,000	-,064	-,353	,729	,050	20,054
Y1	,078	,034	,229	2,258	,038	,158	6,347

a. Dependent Variable: Y2

Sumber : Data Diolah, 2023

Keterangan :

Y_2 = Tingkat Kemiskinan
Y_1 = Tingkat Pengangguran
X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Indeks Pembangunan Manusia
X_3 = Upah minimum

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 5.10, maka dapat dilhat hasil regresinya sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,404. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih besar dari alpha (0,404 > 0,05), artinya Ho diterima dan Ha ditolak artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil ini tidak sependapat dengan Maipita (2014) yang mengatakan jika pertumbuhan yang dapat meningkatkan return terhadap faktor yang merupakan sumber pendapatan bagi penduduk miskin semakin besar, maka akan semakin besar pula kemungkinan dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi belum dapat mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Pertumbuhan Ekonominya masih mengalami naik dan turun setiap Tahunnya sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,019. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha (0,019 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima artinya Indeks Pembangunan

Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hasil ini sependapat dengan (Soekapdjo & Oktavia, 2021) yang mengatakan IPM merupakan Gambaran dari kesejateraan masyarakat karena semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin sehat masyarakat dan semakin meningkat pendapatan masyarakat maka produktivitas masyarakat akan semakin meningkat, apabila IPM semakin meningkat maka tingkat kemiskinan juga akan semakin menurun. Berpengaruhnya Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan. Meningkatnya IPM menunjukkan meningkatnya Pendidikan dan Kesehatan penduduk. Pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas dalam mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan. Selain itu, kesehatan merupakan syarat dalam meningkatkan produktivitas, karena dengan kesehatan, pendidikan mudah di capai. Dalam hal ini, kesehatan dan pendidikan merupakan komponen penting pembangunan ekonomi dalam membantu mengurangi kemiskinan. Dengan pendidikan dan kesehatan maka pendapatan tinggi akan mudah di dapat sehingga berdamapk terhadap tingkat kemiskinan.

3. Variabel Upah Minimum

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Upah Minimum sebesar 0,729. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih besar dari alpha (0,729 < 0,05),

Ho diterima dan Ha ditolak artinya Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan Kurniawati et al (2017) yang mengatakan upah minimum adalah jaring pengaman bagi pekerja tidak terampil dan serikat pekerja yang lemah, sehingga mereka memiliki daya tawar yang kecil. Upah minimum di Indonesia pada awalnya ditetapkan atas dasar Kebutuhan Hidup Rendah (KHL), dalam rangka melindungi kesejahteraan pekerja dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja berupah rendah. Jika efektif, upah minimum dapat digunakan sebagai alat pengentasan kemiskinan karena dapat mengeluarkan orang miskin dari kemiskinan. Tidak berpengaruhnya upah minimum terhadap tingkat kemiskinan karena upah minimum adalah standar yang digunakan untuk orang yang bekerja di perusahaan, sementara penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dominan bekerja sebagai petani.

4. Variabel Tingkat Pengangguran

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Tingkat Pengangguran sebesar 0,038. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha (0,038 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima artinya Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil ini sependapat dengan Prawoto (2021) yang mengatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan

peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu Negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunanekonomi dalam jangka panjang. Berpengaruhnya Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan karena Tingkat Pengangguran menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan hasil regresi terdapat variabel bebas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan maka model persamaan struktural II perlu diperbaiki melalui model *Trimming.* Proposisi menjadi Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

5.3.2 Uji Asumsi Klasik Persamaan Struktural II Setelah Trimming

a. Uji Normalitas Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan analisis grafik seperti pada Gambar 5.2 berikut :

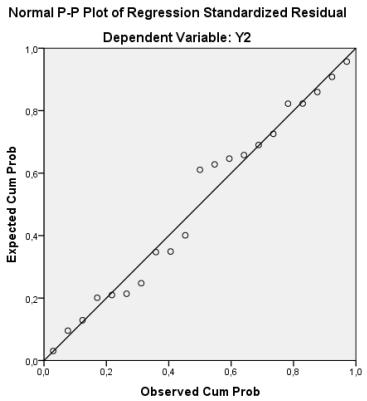

Gambar 5.2. Grafik Histogram Normalitas Persamaan Struktural II Setelah Trimming
Sumber : Data Diolah, 2023

Gambar 5.2 mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal. Berdasarkan pada grafik histogram normal probabiliti, menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak dipakai dalam penelitian karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Untuk meneliti apakah terdapat multikolinieritas terhadap variabel bebas maka dapat dilihat hasilnya pada Tabel berikut ini :

Tabel 5.11 Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Persamaan Struktural II Setelah Trimming

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	X_2	,163	6,122
2	Y_1	,163	6,122

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada Tabel 5.11 diatas, dapat dilihat nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, artinya bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini adalah terbebas dari multikolonieritas atau dengan kata lain dapat dipercaya dan objektif.

c. Uji Autokorelasi Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi/keterkaitan antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam perhitungan regresi atas penelitian ini maka digunakan Durbin-Watson Test sebesar 1,874.

Dengan menggunakan Tabel statistik jumlah observasi 21 serta jumlah variabel bebas 2 maka diperoleh angka dl = 1,125 dan du = 1,538 sedangkan nilai untuk 4-dl = 2,875 dan 4-du = 2,462 dengan menggunakan uji statistk Durbin

Watson dua ujung (two tailed) maka patokan yang digunakan adalah sebagai berikut:

d < dl = berarti terdapat autokorelasi positif
d > dU = berarti tidak terdapat autokorelasi positif
(4-d) < dl = berarti terdapat autokorelasi negative
(4-d) > dU = berarti tidak terdapat autokorelasi negative
du < d < (4-du) = berarti tidak terdapat autokorelasi
dl < d < du atau (4-du) = berarti tidak dapat disimpulkan

Hasil yang diperoleh adalah nilai DW observasi terletak pada daerah d > dU berarti tidak terdapat autokorelasi positif dalam penelitian ini.

d. Uji Heteroskedastisitas Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Gambar grafik nilai-nilai residu, uji Breusch-Godfrey dan Uji Park. Penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey.

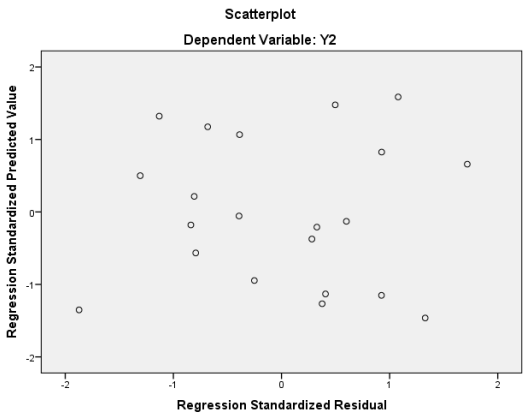

Gambar 5.3 Uji Heteroskedastisitas Persamaan Struktural II Setelah Trimming
Sumber : Data Diolah, 2023

Dengan melihat Gambar 5.3 diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 dan Sumbu Y. Maka dapat disimpukan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan struktural II.

5.3.3 Uji Statistik Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Berdasarkan olahan data regresi linier berganda untuk persamaan struktural II setelah menggunakan model Trimming dengan menggunakan SPPS.25 maka hasil regresi linier berganda tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

1. **Uji F Statistik**

Untuk menguji pengaruh antara variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependent) secara simultan digunakan alat uji F statistik yang dapat dilihat pada hasil output program SPSS 20 pada Tabel ANNOVA sebagai berikut :

Tabel 5.12 Hasil Uji F Statistik Persamaan Struktural II Setelah Trimming

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,174	2	8,587	320,882	,000[b]
	Residual	,482	18	,027		
	Total	17,656	20			

a. Dependent Variable: Y2
b. Predictors: (Constant), Y1, X2
Sumber : Data Diolah, 2023

Pengujian secara simultan (Uji F) diketahui nilai signifikansi F statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan.

2. **Uji t Statistik**

Untuk melihat hasil setiap variabel terikat secara parsial yang diuji dengan uji-t secara rinci koefisien regresi pada setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 5.13 yang menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.13 Hasil Regresi Berganda Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	22,947	1,467		15,638	,000		
X2	-,167	,021	-,776	-8,053	,000	,163	6,122
Y1	,077	,033	,226	2,341	,031	,163	6,122

a. Dependent Variable: Y2

Sumber : Data Diolah, 2023

a) Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,000. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha (0,000 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima artinya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b) Tingkat Pengangguran

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel Tingkat Pengangguran sebesar 0,031. dengan tingkat keyakinan (α=5%), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha (0,031 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima artinya Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Uji Determinan

Analisis koefisiensi determinasi (KD) digunakan untuk melihat beberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam persentase. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 5.14 Hasil Uji R^2 Square Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,986[a]	,973	,970	,16359	,973	320,882	2	18	,000	1,874

a. Predictors: (Constant), Y1, X2
b. Dependent Variable: Y2

Berdasarkan Tabel 5.14 diatas dapat diketahui bahwa nilai R^2 0,973, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Tingkat Kemiskinan sebesar 97,3 persen. Sisanya sebesar 2,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

4. Interpretasi Hasil

Untuk mengetahui interpretasi hasil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini :

Tabel 5.15 Interpretasi Hasil

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	22,947	1,467	
X2	-,167	,021	-,776
Y1	,077	,033	,226

Sumber : Data Diolah, 2023

Keterangan :

Y_2 = Tingkat Kemiskinan

Y_1 = Tingkat Pengangguran

X_2 = Indeks Pembangunan Manusia

$$\mathbf{Y_2 = 22{,}947 - 0{,}167X_2 + 0{,}077Y_1}$$

1. Koefesien Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0,167 hal ini berarti setiap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebanyak 1 sementara variabel lain adalah konstan atau nol atau tidak berubah maka Tingkat Kemiskinan menurun sebesar 0,167 persen.
2. Koefesien Tingkat Pengangguran sebesar 0,077 hal ini berarti setiap peningkatan Tingkat Pengangguran sebanyak 1 persen sementara variabel lain adalah konstan atau nol atau tidak berubah maka Tingkat Kemiskinan meningkat sebesar 0,077 persen.

5.3.4 *Path Analysis* Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Selanjutnya untuk mengetahui nilai koefisien jalur variabel bebas dapat dilihat pada Tabel 5.16 pada nilai coefficient beta. Nilai koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia yaitu -0,776, dan nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran yaitu 0,226, sementara nilai residu yaitu 1- R^2 (1 - 0,973 = 0,027). Untuk mengetahui nilai koefisien jalur $\boldsymbol{r}x_2y_1$ dapat dilihat pada Tabel korelasi berikut :

Tabel 5.16 Hasil Korelasi Persamaan Struktural II Setelah Trimming

Correlations

		X2	Y1
X2	Pearson Correlation	1	-,915**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	21	21

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil korelasi dapat dilihat pearson correlation antara Indeks Pembangunan Manusia dengan tingkat pengangguran nilai korelasinya sebesar -0,915 sehingga diperoleh diagram jalur yang dapat digambarkan pada Gambar 5.4 berikut:

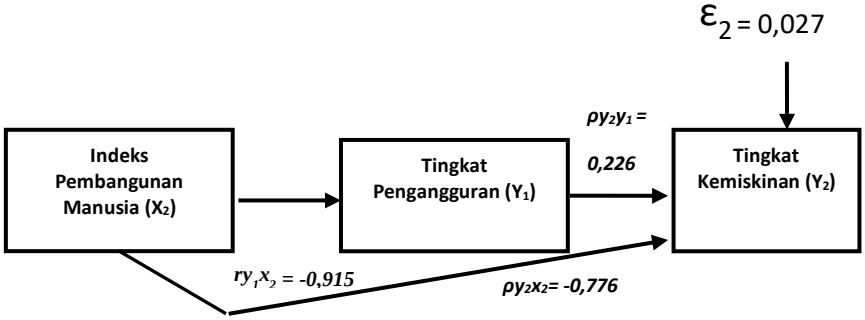

Gambar 5.4 Diagram Jalur Persamaan Struktural II

Dari Gambar 5.4 dapat dihitung pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen, pengaruh langsung dan tidak langsung X_2 melalui variabel Tingkat Pengangguran.

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan :

   a. Pengaruh langsung Indeks Pembangunan manusia ke Tingkat Kemiskinan $= (\rho y_2 x_2)^2 \times 100\%$
   $= (-0{,}776)^2 \times 100\%$
   $= 60{,}2\%$

   b. Pengaruh tidak langsung Indeks Pembangunan Manusia ke Tingkat Kemiskinan $= (\rho y_2 x_2)(r x_2 y_1)(\rho y_2 y_1) \times 100\%$
   $= (-0{,}776)(-0{,}915)(0{,}226) \times 100\%$
   $= 16\%$

   c. Pengaruh total Indeks Pembangunan Manusia ke Tingkat Kemiskinan $= 60{,}2\% + 16{,}1\%$
   $= 76{,}2\%$

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan :

   a. Pengaruh langsung Tingkat Pengangguran ke Tingkat Kemiskinan $= (\rho y_2 y_1)^2 \times 100\%$
   $= (0{,}226)^2 \times 100\%$
   $= 5{,}1\%$

   b. Pengaruh tidak langsung kesempatan kerja ke Tingkat Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia $= (\rho y_2 y_1)(r x_2 y_1)(\rho y_2 x_3) \times 100\%$
   $= (0{,}226)(-0{,}915)(-0{,}776) \times 100\%$
   $= 16\%$

c. Pengaruh total Tingkat Pengangguran
ke Tingkat Kemiskinan = 5,1% + 16,1%
= 21,1%

Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel eksogen yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan dapat terlihat pada Tabel 5.17 berikut :

Tabel 5.17 Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Persamaan Struktural II Variabel X_2 dan Y_1 terhadap Y_2

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal			Pengaruh Total (%)
	Langsung (%)	Tidak Langsung (%)		
		X_2 (%)	Y_1 (%)	
$X2 \rightarrow Y_2$	60,2	-	16	76,2
$Y_1 \rightarrow Y_2$	5,1	16	-	21,1
Pengaruh Variabel X_2 dan Y_1 terhadap $Y_2 = R^2$				**97,3**
Pengaruh Variabel Luar				**2,7**
Total				**100,0**

Sumber : Data Diolah, 2023

Atas dasar perhitungan di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kekuatan Indeks Pembangunan Manusia yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Tingkat Kemiskinan sebesar 60,2 persen, dan yang melalui hubungannya dengan Tingkat Pengangguran sebesar 16 persen. secara total Indeks Pembangunan Manusia menentukan perubahan-perubahan Tingkat Kemiskinan sebesar 76,2 persen.
2. Kekuatan Tingkat Pengangguran yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Tingkat Kemiskinan sebesar 5,1 persen, dan yang melalui hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 16

persen. secara total Tingkat Pengangguran menentukan perubahan-perubahan Tingkat Kemiskinan sebesar 21,1 persen.

5.4 Hasil Akhir Skema Path Analysis

Setelah ditemukan koefisien jalur pada variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap variabel maka dapat dibentuk skema path analysis (analisis jalur) dengan cara penggabungan dua hasil persamaan struktural tersebut.

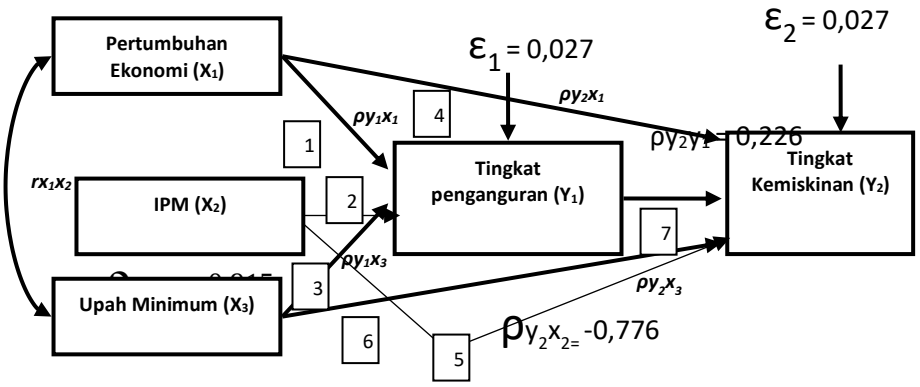

Gambar 5.5. Diagram Jalur Persamaan Struktural I dan Persamaan Struktural II

Berdasarkan Gambar 5.5. dapat dilihat bahwa hanya variabel Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki pengaruh langsung terhadap Tingkat Pengangguran dengan nilai coeficient path sebesar -0,915 Kemudian Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui tingkat pengangguran dengan koefisien path sebesar -0,776, sementara Tingkat Pengangguran juga memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai koefisien sebesar 0,226.

5.5 Implikasi Kebijakan

Arah dan kebijakan umum dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pertama, mempertajam fokus kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan. Dengan mempertajam fokus kelompok sasaran ini, maka yang diharapkan adalah upaya-upaya pengentasan masyarakat miskin atau program pembangunan sektor sosial lain benar-benar dapat terarah, dan menjangkau lapisan masyarakat yang berada di tingkat paling rentan. Bila fokus kelompok sasaran tidak terarah biasanya program akan rawan bias, dan tidak mustahil jatuh kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak. Selama ini, masing-masing dinas atau instansi biasanya mereka menentukan sendiri-sendiri kelompok mana yang menjadi sasaran prioritas.

Selain pemborosan anggaran karena tiap instansi harus menyediakan tenaga, waktu dan dana sendiri untuk keperluan pendataan awal kelompok sasaran kecenderungan untuk berjalan sendiri ini acapkali menyebabkan dampak program menjadi parsial karena sifatnya tidak terpadu. Untuk lebih efisien dan mencapai kesamaan fokus kelompok sasaran, perlu dipikirkan langkah segera untuk melakukan pendataan kelompok sasaran dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai instansi.

Di bidang sosial dapat dipakai hasil pendataan keluarga sejahtera dari BKKBN, namun instrumen pendataan perlu ditambah dengan indikator lain dari segi pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Sehingga dapat dirumuskan, keluarga miskin yang menjadi prioritas sebagai kelompok sasaran adalah keluarga pra-sejahtera alasan ekonomi, terutama mereka yang saat ini menganggur, memiliki

anak yang putus sekolah atau anak yang bekerja, dan dari segi kesehatan anggota keluarga miskin tersebut termasuk kategori kurang gizi atau sering sakit.

Kedua, mendorong pemberdayaan dan pengembangan kegiatan produktif keluarga miskin. Selama ini, kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif masyarakat miskin, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat miskin yang lebih substansial. Selama ini, program penanggulangan kemiskinan lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Program bantuan permodalan dan bantuan teknologi yang diberikan pemerintah meski dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, namun, tersirat maksud yang sesungguhnya adalah untuk meningkatkan produksi demi kepentingan ekspor dan pencapaian PAD.

Upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sesungguhnya tidak selalu harus dengan cara memacu perkembangan dan semata hanya berusaha meningkatkan volume atau jumlah produksi sektor usaha kecil tersebut. Sebagai salah satu alternatif dan mungkin juga dapat dilakukan secara bersamaan pola lain yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan usaha kecil, adalah dengan cara melakukan efisiensi proses produksi, yang disertai bantuan teknologi produksi dan perbaikan manajemen produksi. Selain itu, untuk meningkatkan kadar keberdayaan keluarga miskin dan sekaligus mencegah resiko kemungkinan terjadinya kegagalan total dari usaha keluarga miskin, maka sebaiknya pada saat yang bersamaan tiap-

tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha yang beraneka-ragam yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini untuk mencegah ketergantungan sebuah keluarga pada satu jenis mata pencaharian, yang relatif secara sosial-ekonomi lebih rapuh, dibandingkan dengan keluarga yang melakukan diversifikasi usaha. Keluarga yang mengembangkan pola diversifikasi usaha, dalam kehidupan sehari-hari akan lebih berdaya dan lentur terhadap tekanan kebutuhan ekonomi.

Sejalan dengan pola diversifikasi usaha tersebut, satu hal yang perlu diperhatikan adalah, bahwa untuk mempercepat pengembangan kegiatan produktif masyarakat miskin, program-program penanggulangan kemiskinan sebaiknya tidak hanya terfokus kepada kepala keluarga, yang dalam hal ini adalah laki-laki, tetapi juga perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan produktif secara nyata.

Ketiga, meningkatkan posisi bargaining (tawar) dan mengurangi kerentanan keluarga miskin. Program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan jangan hanya terjebak pada program bantuan yang bersifat sementara dan menciptakan ketergantungan baru, melainkan harus lebih mengedepankan program yang berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat *people centered, participatory, empowering,* dan *sustainable*. Maksud pemberdayaan disini adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis, ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan, mengutamakan

usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Keempat, meningkatkan peran lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan atau bias di tingkat pelaksanaan, maka prasyarat yang dibutuhkan selain harus ada jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan, juga harus didukung oleh mekanisme dan sistem pengawasan yang kuat, khususnya keterlibatan dan pengawasan dari masyarakat miskin itu sendiri sebagai kelompok sasaran dan pengawasan dari lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat. Beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi rawan penyimpangan apabila pengawasan dari masyarakat tidak berjalan secara memadai. Berbagai bantuan modal kegiatan produktif yang dikucurkan, selain tidak tepat sasaran, seringkali juga dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk kepentingan pribadi. Beberapa bentuk kegiatan taktis yang perlu dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan adalah: (1) pemasangan "papan informasi" di tiap desa/ kelurahan sebagai media informasi alokasi dana dan rincian program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan, dan (2) pembentukan tim verifikasi di tiap desa/kelurahan yang melibatkan berbagai elemen dan kelompok sekunder di masyarakat, termasuk LSM, yang bertugas untuk memberikan keputusan terakhir dalam penentuan kelompok sasaran

program, sekaligus berperan sebagai kelompok kontrol terhadap pelaksanaan program di luar mekanisme kelembagaan yang sudah ada.